



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen 51161

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini dapat kami susun tepat waktu sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024. Tahun 2024 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, semoga laporan ini bermanfaat.

Kajen, 31 Januari 2025

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "PEKALONGAN" is written at the top and "KABUPATEN PEKALONGAN" at the bottom. In the center, there is a logo featuring a building and a star. Below the logo, the name "M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si" is written, followed by the title "Pembina Utama Muda" and the NIP number "NIP. 19750710 199903 1 008".
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga/Instansi. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dengan menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Program. Sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 3 (tiga) indikator kinerja dan Keberhasilan Program diukur menggunakan target kinerja pada 11 (sebelas) Indikator kinerja.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dari dua sasaran strategis yang terdiri dari 3 indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, seluruh Sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat Daerah, yaitu Nilai SAKIP Kabupaten, Tingkat Kematangan Organisasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten. Untuk Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah dari 11 (sebelas) indikator adalah 100 %.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	(%)
1		2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	B (64,80)	B (64,90)	B (64,80)*	99,85 %
2.		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,89)	B (64,90)	B (65,69)	101,22 %

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	(%)
1		2	3		4	5	6
			Tingkat Kematangan Organisasi	S (36,50)	S (36,6)	& (38,66)	105,63 %
3.		Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83	84	83,44	99,33 %
Rata – rata Capaian IKU							101,60 %
Rata – rata Capaian Indikator Sasaran							102,18 %

*Data Tahun 2023, LHE Tahun 2024 masih menunggu hasil dari MENPAN RB

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.53.460.805.839,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 56.301.037.000,00 sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan efisiensi sebesar Rp. 2.840.231.161,00.

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan kegiatan dengan baik dan relevan dengan dokumen sasaran strategis.

Kajen, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi	2
B.1 Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	2
B.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	6
C. Isu Strategis/Permasalahan Utama yang Dihadapi	7
D. Sistematika Penyajian LkjIP.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
a. Pengukuran Kinerja	21
b. Capaian Indikator Kinerja Utama	26
c. Capaian Kinerja Sasaran	27
B. Realisasi Anggaran.....	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Prestasi yang diraih.....	84
C. Hal – Hal yang Ingin Dicapai Ditahun Mendatan.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan perlu penataan organisasi pemerintahan yang baik yaitu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan dengan mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif, profesional, berkarakter, akuntabel dan dengan dukungan sistem mekanisme kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, diyakini mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang baik. Sejalan dengan RPJM Nasional yang pada nilainya menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat dengan lebih produktif, profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja Sekretariat Daerah dalam tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 serta RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perubahan Tahun 2024 terutama capaian sasaran yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan pemerintah Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pembinaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.1. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

- a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Koordinator Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
2. Bagian Hukum, terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Perundang-undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum ; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- a) Subkoordinator Bina Mental Spiritual; dan
 - b) Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
 - c) Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
 - b) Sub Koordinator Perekonomian
 - c) Sub Koordinator Sumber Daya Alam
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Penyusunan Program;
 - b) Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Koordinator Evaluasi Dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- a) Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - c) Sub Koordinator Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kelembagaan.
2. Bagian Umum, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan

- c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Peralatan.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan
 - c) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan

B.2 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan per Desember 2024 berjumlah 154 orang, yang terdiri dari 151 Orang ASN dan 3 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		L	P	L	P		
1	SD	2	-	-	-	2	1,30%
2	SMP Sederajat	3	-	-	-	3	1,95%
3	SMA Sederajat	33	4	-	1	38	24,68%
4	D3	10	5	-	1	16	10,39%
5	D4	2	-	-	-	2	1,30%
5	S1	28	39	-	1	68	44,16%
6	S2	15	10	-	-	25	16,23%
7	S3	-	-	-	-	-	0 %
	Jumlah (orang)	93	58	-	3	154	100%
	Persentase (%)	60,39%	37,66%	-	1,95%	100%	

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 5 Desember 2024

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2	-	2
2	Golongan II	31	5	36
3	Golongan III	46	50	96
4	Golongan IV	14	3	17
5	PTT		3	3
	Total	93	61	154

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 5 Desember 2024

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan di Sekretariat Daerah :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	4	2	6
2	Eselon III	6	2	8
3	Eselon IV		4	4

4	JFT	20	14	34
5	JFU	63	36	99
6	PTT		3	3
	Total	93	61	154

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 5 Desember 2024

C. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan – permasalahan/isu strategis yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a) Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara Optimal, misalnya : tenaga teknis di bidang perencanaan, tenaga pengkajian di bidang hukum, pengelolaan keuangan/akuntan, tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi, dan tenaga pengelola pengadaan Barang/jasa
- b) Regulasi dari Kementerian PAN RB yang selalu berubah – ubah sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang sudah dikeluarkan
- c) Adanya penyetaraan eselon IV menjadi jabatan fungsional serta adanya beberapa fungsional Muda mengalami promosi jabatan menjadikan kurangnya personil untuk bisa ditunjuk sebagai Pejabat PPTK.
- d) Harapan masyarakat yang semakin tinggi atas pelayanan yang oleh unit – unit pelayanan sehingga memerlukan inovasi dalam pelayanan.
- e) Nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Pekangan yang masih di kategori B (Baik) sehingga perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi agar nilai Evaluasinya bisa menjadi BB
- f) Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang belum optimal
- g) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah
- h) Belum optimalnya pemanfaatan standar operasional, monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.

D. Sistematika penyajian LKjIP:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2021 – 2026.

Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan **misi ke-2 RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026** yaitu: **Menciptakan Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan inovasi berbasis kemajuan teknologi informasi**, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 - 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mendukung Program ini, ada 4 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk mendukung Program ini, ada 4 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- c. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- d. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk mendukung Program ini, ada 11 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penataan Organisasi
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- i. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- j. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- k. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk rencana induk (*Master Plan*) secara komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*Competitive Disadvantage*).

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudkan suatu pelayanan yang prima. Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten harus mampu mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mendorong dan merangsang kinerja untuk mewujudkan gambaran masa depan yang diinginkan.

Oreintasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 :

” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (SETARA) dan Berbudaya Gotong royong ”

Tabel 2.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan;b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadaic. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnyad. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadaie. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.
Adil	<ul style="list-style-type: none">a. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalonganb. Menghilangkan ego structuralc. Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongand. Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang-undangan yang berkeadilan

UNSUR VISI	PENJELASAN
Merata	a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian b. Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai c. Terbukanya konektivitas antar wilayah
Bergotong royong	a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas c. Menumbuhkan sikap tolong menolong d. Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan e. Meningkatkan rasa solidaritas f. Memperkokoh Persatuan

Sumber : Renstra Setda 2016-2021

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu Instansi Pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu Instansi Pemerintah yang ingin dicapai.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pekalongan tahun 2021 - 2026 adalah:

- 1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong;
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
- 3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keadilan dan pemerataan
- 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan mengarah pada pencapaian unsur visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) yaitu berada pada **misi ke-2 yaitu: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.**

3. Tujuan

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka perlu disusun tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan periode Renstra 2021 – 2026 yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

4. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 2021 - 2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik yang Didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai yang dilaksanakan dalam dalam jangka waktu lima tahun kedepan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 2 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi									
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	64,60	B (66)	B (70)	B (71)	BB (73)	BB (74)
		1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten	64,02	B (65)	B (67)	B (70)	BB (73)	BB (75)
			b. Tingkat Kematangan Organisasi	S (28 – 36)	S (32)	S (34)	S (35)	T (36)	T (37)
		2) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	76	78	78	79	80	80

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan 2021 - 2026

Tabel. 2.3
Tabel Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (64,9)
1.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,9)
		Tingkat Kematangan Organisasi	Sedang (36,6)
1.2	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,60

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah merupakan proses penyusunan rencana kinerja tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran – sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Sekretariat Daerah yang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Secara singkat Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,9)
		b. Tingkat Kematangan Organisasi	S (36,6)
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,60

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tersebut, maka didukung 3 (Program) sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.682.800.000,00 (31,41 %)
2. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.879.406.400,00 (3,34%)
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.738.830.600,00 (65,25%)

Total Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 = Rp. 56.301.037.000,00



Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Program di atas mendukung sasaran Sekretariat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program yang Mendukung Sasaran

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten			B (64,9)
			Program Penunjang urusan Pemerintah	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100%
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Prosentase Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100%
				Prosentase Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang tersusun	100%
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan	Prosentase Laporan Penyelenggaraan pemerintahan	100%			

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
			Rakyat	terkait tata pemerintahan yang tersusun secara ketentuan	
		b. Tingkat Kematangan Organisasi			S (36,6)
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (angka)
			Program Penunjang urusan Pemerintah	Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100 %
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten			83,6
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Permohonan Kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %
				Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %
				Prosentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %
				Prosentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
			Program Penunjang urusan Pemerintah	Prosentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, administrasi Umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
				Prosentase Pengadaan/Peeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Untuk mencapai kinerja 3 (Tiga) Program tersebut, didukung oleh 19 Kegiatan, yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
I.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	925.000.000,00
1.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	925.000.000,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	144.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
2.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	144.000.000,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	382.800.000,00
3.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	382.800.000,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %	4.872.400.000,00
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	11.358.600.000,00
4.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	16.231.000.000,00
II.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan hasil koordinasi,	100 %	951.406.400,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun		
5.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	620.000.000,00
6.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %	331.406.400,00
II	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	323.000.000,00
7.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100 %	323.000.000,00
II	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (Angka)	605.000.000,00
8.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	605.000.000,00
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 %	390.200.000,00
9.	Kegiatan Penataan	Prosentase	100 %	351.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
	Organisasi	perangkat daerah berkinerjanya baik		
10.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	39.200.000,00
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	32.354.130.600,00
11.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	18.520.055.000,00
12.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	289.825.600,00
13.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	3.292.000.000,00
14.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan	100 %	3.877.250.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		pemerintahan daerah		
15.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1.824.440.000,00
16.	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	2.220.000.000,00
17.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	2.330.560.000,00
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	3.994.500.000,00
18.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	747.500.000,00
19.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.247.000.000,00
				56.301.037.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun ketiga perencanaan pada Renstra Tahun 2021 – 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2024 ini dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Capaian kinerja organisasi adalah keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja Sekretariat Daerah diukur dari Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	≥ 85 - 100%	Baik
3.	≥ 65 – 85 %	Cukup
4.	≥ 50 – 65 %	Kurang
5.	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

a. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Sebelum melakukan analisa terhadap sasaran strategis yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan berikut informasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dari Tahun 2024.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Th. 2023	Target Th. 2024	Realisasi Th. 2024	% capaian
1.	Indek reformasi birokrasi	B (66,56)	B (64,90)	B *) (64,80)	99,85
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,89)	B (64,90)	B (65,69)	101,22
3.	Tingkat Kematangan Organisasi		S (36,60)	T (38,66)	105,63
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,44	83,60	83,35	99,70
	Rata – rata capaian IKU				101,60

*) : LHE RB tahun 2023

Dari tabel diatas disampaikan bahwa Indikator kinerja utama pada Sekretariat Daerah terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran organisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Rentra). Rata – rata capaian kinerja utama sebesar 101,60% tercapai dengan kategori **Sangat Baik**

Pada indikator tujuan Indeks reformasi birokrasi capaian kinerja masih menggunakan pengukuran tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2024 Kemenpan RB belum mengeluarkan LHE Tahun 2024 dikarenakan masih melakukan evaluasi capaian rencana aksi Kab/ Kota seluruh Indonesia. Capaian Indeks reformasi birokrasi sebesar 64.80, hal ini ditunjukkan dari hasil evaluasi reformasi birokrasi yang di keluarkan oleh

kementrian PAN Dan RB Tahun 2023, yang terdiri dari 2 komponen yaitu RB general dengan nilai 58.12 dan RB tematik dengan nilai 6.68. Namun demikian hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Indeks RB Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 adalah 64,80 dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	58,12
2	RB Tematik	20	6,68
3	Indeks RB	120	64,80
			B

Sumber: LHE RB Tahun 2023

Capaian indeks Reformasi Birokrasi dengan kategori B (64,80) menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Pekalongan dalam kategori baik namun masih perlu perbaikan.

Pencapaian indeks reformasi ini didukung dengan pencapaian sasaran – sasaran kinerja sebagaimana terascading dalam dokumen RENSTRA 2021 – 2026 yaitu:

1. Nilai SAKIP Kabupaten
2. Tingkat Kematangan Organisasi
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten

Adapun capaian pencapaian sasaran – sasaran kinerja tersebut akan dijelaskan secara rinci dalam capaian kinerja sasaran organisasi.

c. Capaian Kinerja Sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100	Sangat Baik
2	85 < x ≤ 100	Baik
3	65 < x ≤ 85	Cukup
4	50 < x ≤ 65	Kurang
5	≤ 50	Sangat Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana strategis 2021 - 2026, untuk tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2024 dan perjanjian kinerja Tahun 2024 untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan.

Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA	% Capaian Terhadap Kinerja Pada Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,3)	B (64,8)	B (64,90)	B (65,69)	101.22	B (75)	87,59
2	Tingkat Kematangan Organisasi	S (29,4)	S (36,5)	(36,60)	(38,66)	105.63	T (37)	104,49
Rata - rata						103,43		96,04

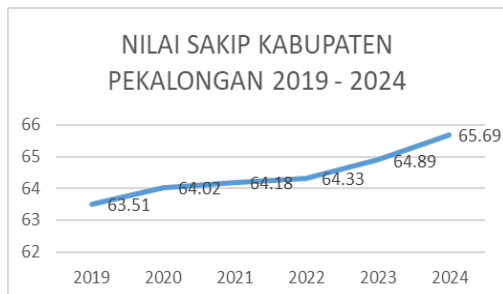
Dari tabel diatas nampak bahwa rata – rata capaian kinerja pada tahun 2024 berhasil menunjukkan capaian sebesar 103,43% atau tercapai dengan **kategori sangat Baik**.

Dan jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023, capaian kinerja sasaran ini mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan target akhir perencanaan (RENSTRA) sudah menunjukkan capaian kinerja sebesar **96,04%** tercapai dengan **kategori Baik**.

1. Pada indikator Sasaran Nilai SAKIP Kabupaten indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja sebesar 101.22%, Capaian Nilai SAKIP Kabupaten Pekalongan tercapai dengan predikat **BAIK** dengan angka 65.69 artinya menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, **yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja**. Adapun komponen penilaian AKIP sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja, dengan bobot 30% hasil evaluasi 23,36%
- Pengukuran kinerja, dengan bobot 30% hasil evaluasi 17,36%
- Pelaporan kinerja, dengan bobot 15% hasil evaluasi 11,54%
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dengan bobot 25% hasil evaluasi 13,43%



Perbandingan capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten selama 5 (lima) Tahun terakhir nampak pada grafik disamping ini. Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 evaluasi dilaksanakan secara daring yaitu dengan mengirimkan data dukung sakin baik

tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat daerah sebagai sampel melalui email dan melihat dokumen yang sudah di upload ke dalam aplikasi <https://esr.menpan.go.id/>.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP yaitu adanya kerja sama Tim Teknis SAKIP baik pada level Pemerintah Kabupaten maupun pada level perangkat daerah serta kinerja APIP yang telah menyelesaikan evaluasi internal semua perangkat daerah tepat waktu.

2. **Pada indikator Tingkat Kematangan Organisasi** menunjukkan capaian kinerja sebesar 105.63% tercapai dengan kategori **Sangat baik**. Tahun 2024 Tingkat Kematangan Organisasi Kabupaten Pekalongan 38.66 dengan kategori “Tinggi” ini menunjukkan menunjukkan bahwa tata kelola dan kinerja pemerintahan berkualitas, sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal.

Adapun komponen dalam kematangan organisasi yaitu

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah,
- b. Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah,
- c. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah,
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah,
- e. Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur,
- f. Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah,
- g. Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur,
- h. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur,
- i. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur,
- j. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah,
- k. Budaya Organisasi Perangkat Daerah.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- Komitmen Pimpinan dalam melakukan penataan Perangkat Daerah
- Kerjasama yang baik antara Tim Evaluasi Kematangan Organisasi Kabupaten dengan Tim evaluasi kematangan organisasi perangkat Daerah
- Komitmen yang baik dari Perangkat Daerah dalam memenuhi data dukung penilaian

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja Nasional/Provinsi.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan
Capaian Kinerja Nasional/Provinsi

No	Uraian	Realisasi 2024	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Kabupaten	B (65,69)	Rata – rata Nilai Sakip Kab/Kota secara Nasional adalah 64,23	102,27 %
2	Tingkat Kematangan Organisasi	T (38,66)	Kematangan Organisasi Provinsi Jawa Tengah T (43,38)	89,12 %

Pada tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan pada Indikator capaian Nilai SAKIP berada diatas rata – rata capaian nilai Sakip Kabupaten/kota secara Nasional, meskipun demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tetap terus berusaha agar capaian nilai SAKIP bisa mencapai kategori BB untuk kedepannya

Untuk capaian indikator Kematangan Organisasi, secara angka masih berada dibawah capaian provinsi Jawa Tengah namun secara kategori berada pada level kategori yang sama yaitu Kategori Tinggi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah antara lain:

1. Dalam Evaluasi SAKIP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen – dokumen Perencanaan (RKT dan Renstra/ RPJMD, Renja/RKPD), Penganggaran, Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi tapi adanya dokumen – dokumen lain yang perlu disajikan sebagaimana lembar kerja evaluasi perangkat daerah pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Pekalongan,
2. Masih adanya dokumen LKjIP yang kualitasnya belum sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014
3. Perlu adanya strategi pemecahan masalah dengan melihat capaian Kab/ kota lain.

- Masih kurangnya sumber daya dan masih terdapat beberapa perangkat daerah yang tingkat kematangannya rendah,

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait guna menindaklanjuti permintaan dari TIM Evaluasi untuk melengkapi kekuarangan/ dokumen tambahan diluar dokumen SAKIP yang sudah disusun.
- Melakukan rapat koordinasi dalam rangka penguatan sistem AKIP dan meningkatkan kualitas dokumen LKjIP Perangkat Daerah
- Melakukan Studi banding ke Kab/ Kota lainnya dan menerapkan strategi penyelesaian masalah terhadap apa yang menjadi kelemahan – kelemahan selama ini.
- adapun upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pendampingan guna pemenuhan variabel penilaian kematangan organisasi pada perangkat daerah.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp.3.194.606.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.030.695.396 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp.163.911.004,00. Atau terserap sebesar 94,87 % dengan efisiensi sebesar 5,13 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisien Anggaran sasaran Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan			
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,90)	B (65,69)	101,22	2.463.606.400	2.318.101.313	94,09	5,91
Tingkat Kematangan Organisasi	S (36,6)	T (38,66)	105,63	731.000.000	712.594.083	97,48	2,52

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan			
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Total				3.194.606.400	3.030.695.396	94,87	5,13

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Sasaran Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

❖ **Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kabupaten**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
1.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	100 %	100%
	a. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari subkegiatan:

- a. Penataan Administrasi Pemerintahan, yaitu menyiapkan dan memfasilitasi rapat dinas forum komunikasi pimpinan daerah, menyusun rencana aksi pengembangan sumber daya manusia dan menyusun laporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) serta. menyusun laporan dalam bidang administrasi pemerintahan secara rutin
- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, pada subkegiatan ini menyiapkan dan memfasilitasi inventarisasi penegasan batas daerah/toponimi pemetaan wilayah, dan menyusun kebijakan daerah dalam pengelolaan administrasi kewilayahan.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, pada subkegiatan ini menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjaaban (LKPJ) Bupati, melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif, dan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100%	100%	100%
2.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	100%	100%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100%	100%	100%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM,	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
		Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun, mencapai 100%.

Capaian Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Perekonomian.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terdiri dari sub kegiatan:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa koordinasi dan pembinaan terhadap kinerja keuangan pada BUMD dan BLUD, sinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah dengan BUMD dan BLUD. Bagian Perekonomian melakukan pembinaan kepada 4 BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta kajen dan 29 BLUD yang terdiri dari 27 Puskesmas se-Kabupaten Pekalongan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah yaitu dengan menjalankan strategi 4K dalam Pengendalian Inflasi berupa menjaga Keterjangkauan Harga, menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan meningkatkan Komunikasi yang efektif. Selain itu juga melakukan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah serta melakukan pengendalian dan distribusi perekonomian di Kabupaten Pekalongan.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen rencana kegiatan dan program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), melakukan fasilitasi kesekretariatan DBHCHT Kabupaten Pekalongan, dan melakukan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah menghimpun data penghematan energi se-Kabupaten Pekalongan, melakukan pemantauan terhadap pengadaan dan peredaran pupuk, pestisida dan LPG 3 Kg dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan.

Hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan pencapaian indikator adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan seperti kendaraan dinas untuk melakukan monitoring dan Printer dan Scanner untuk melakukan pelaporan serta jumlah personil di Bagian Perekonomian masih terbatas.

Alternatif solusi dalam mengatasi hambatan dengan mengajukan penambahan personil dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	b. Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100%	100%	100%
2.3.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100%	100%	100%
	a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang capaian kinerjanya juga mencapai 100%. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari subkegiatan:

- a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, yaitu menyusun laporan hasil koordinasi dan pengendalian progres kegiatan belanja APBD TA. 2024 dengan mengadakan rapat evaluasi rutin setiap bulannya, dan monitoring lapangan terhadap kegiatan/proyek fisik di Kabupaten Pekalongan

Pada tahun 2024 total jumlah paket pekerjaan adalah 1.775 paket dan yang dilaksanakan sejumlah 1.701 paket pekerjaan. Dengan jumlah paket pekerjaan yang cukup banyak tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan tidak semuanya melakukan monitoring fisik ke lapangan. Prioritas monitoring ditujukan ke paket pekerjaan proyek strategis dan paket pekerjaan yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan Bantuan Keuangan (APBD) Provinsi.

- b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu menyusun laporan Buku Kegiatan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu), Tugas Pembantuan (TP) TA. 2024, dan menyusun laporan Buku Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 serta pemeliharaan aplikasi SIMPEL

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) masih kurangnya personil penata kelola sistem dan teknologi informasi penelaah teknis kebijakan, tenaga pengadministrasi perkantoran;
- 2) Tidak optimalnya monitoring fisik ke lapangan karena jumlah personil dan kendaraan yang kurang;
- 3) Belum semua OPD secara rutin tepat waktu menginput laporannya di Aplikasi SIMPEL;
- 4) Sarana alat perkantoran seperti laptop dan printer yang masih kurang.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Pengadaan sarana kendaraan roda 2 (dua) dan Laptop serta printer.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam hal penginputan di Aplikasi SIMPEL;

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian	100 %	100%	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
		Kinerja			
3.1	Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100%	100 %
	a. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	4 Laporan	133%
	b. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	c. Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3.2.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Daerah				
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	3 Laporan	3 Laporan	100%
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja mencapai 100 %, dengan kegiatan Penataan Organisasi dan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan untuk subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Capaian indikator kinerja Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik pada kegiatan Penataan Organisasi tercapai 100 %. Pada Tahun 2024 Kabupaten Pekalongan telah melakukan evaluasi AKIP seluruh perangkat daerah sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Nomor 700.1.2.1/1.1/EV.SAKIP/V.2024 – 700.1.2.1/9.5/EV.SAKIP/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 nilai AKIP Perangkat Daerah berpredikat Baik (B) sejumlah 22 Perangkat Daerah Dan Sangat Baik (BB) sejumlah 23 Perangkat Daerah.

Dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Bagian Organisasi melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah

Daerah, pendampingan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenPANRB sehingga pada Tahun 2024 ini, Kabupaten Pekalongan berhasil mencapai indeks Pelayanan Publik 4,29 atau Kategori A-.Capaian IPP tahun 2024 ini lebih tinggi dari Tahun 2023 yaitu 3,95 atau kategori B.

Bagian Organisasi juga melakukan pendampingan dan fasilitasi penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Pemkab Pekalongan tahun 2024. Hasil penilaian mengalami peningkatan, pada tahun 2023 Kabupaten Pekalongan memperoleh nilai 90,52 dengan Kategori A Opini Kualitas Tertinggi, di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 96,20 kategori A opini Kualitas Tertinggi.masuk dalam kategori Zona hijau.

Bagian Organisasi dalam rangka monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana telah menyusun laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pemkab serta penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dan SKM Kabupaten Pekalongan.

Dalam mendukung capaian kinerja Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja, telah tersusun dengan baik dan tepat waktu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah dan LKjIP Kabupaten, Dokumen Perjanjian Kinerja Pemkab dan Sekretariat Daerah, Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2024 (Pemkab dan Setda), Dokumen Rencana Aksi, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 (Pemkab dan Setda), dan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Setda Perubahan 2024, Dokumen Penilaian Risiko Setda Tahun 2024 serta laporan Evaluasi Renja Setda Tahun 2024

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah :

- Adanya pergantian pejabat/ pelaksana yang menangani SAKIP pada Perangkat Daerah
- *Schedule/Jadwal* penyusunan pelaporan kinerja (LKjIP) yang selalu bersamaan dengan pelaporan kinerja lainnya yaitu LPPD, LKPJ, LKD dan lainnya sehingga dalam penyusunannya membutuhkan waktu ekstra.

- Keterlambatan pengiriman data oleh beberapa perangkat daerah
Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah :
- Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait guna menindaklanjuti permintaan dari TIM Evaluasi untuk melengkapi kekuarangan/ dokumen tambahan diluar dokumen SAKIP yang sudah disusun
- Melakukan rapat koordinasi dalam rangka penguatan sistem AKIP dan meningkatkan kualitas dokumen LKjIP Perangkat Daerah
- Melakukan Studi banding ke Kab/ Kota lainnya dan menerapkan strategi penyelesaian masalah terhadap apa yang menjadi kelemahan – kelemahan selama ini
- melakukan penagihan ke Perangkat Daerah serta jemput bola data yang diminta.

❖ Indikator Kinerja Tingkat Kematangan Organisasi

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (angka)	9 (angka)	100 %
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	100%
	a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	130 Dokumen	126 Dokumen	96,92 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	340 Orang	340 Orang	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program perekonomian dan pembangunan dengan indikator Tingkat kematangan UKPBJ mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang capaian kinerjanya mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa) yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKBPJ dalam upaya pengembangan/Penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 Variabel meliputi :

- a. Domain Proses, yang mencakup variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen resiko
- b. Domain kelembagaan, yang mencakup variabel pengorganisasian, dan tugas/fungsi
- c. Domain Sumber Daya manusia, yang mencakup variabel perencanaan dan Pengembangan
- d. Domain Sistem Informasi, dengan variabel Sistem Informasi

Dari 9 variabel penilaian di atas, pada tahun 2024 ini UKPBJ Kabupaten Pekalongan telah memenuhi kelengkapan atribut pada Sembilan variabel (9/9) untuk mencapai kematangan UKPBJ Proaktif (level 3).

Jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 126 paket dengan rincian 105 Pemenang dan 19 tender gagal/tanpa pemenang dan 2 tender batal.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 1 indikator subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini karena untuk kegiatan tender pengampu pekerjaan tender adalah dari OPD lain, sedangkan UKPBJ hanya melaksanakan proses tender sehingga tidak bisa secara tepat memprediksi jumlah paket pekerjaan yang akan ditenderkan.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- 1) Terlambatnya pengisian SIRUP oleh Pengguna Anggaran
- 2) Terjadinya permasalahan di Sistem Pengadaan secara Elektronik
- 3) Terlambatnya dokumen tender yang dimasukkan ke UKPBJ dari PPK
- 4) Kurangnya SDM Kelompok Kerja Pemilihan di UKBJ Kabupaten Pekalongan

Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- 1) Memberikan Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengisian SIRUP sehingga bisa tepat waktu, memberikan petugas pendampingan dalam persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik agar memanfaatkan fasilitas LPSE Support yang ada, sehingga permasalahan cepat terselesaikan.
- 3) Menghimbau kepada OPD Se – Kabupaten Pekalongan untuk segera memasukkan berkas tender sehingga tender dapat terlaksana di awal tahun anggaran.
- 4) Meningkatkan Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ Kabupaten Pekalongan dengan Bintek ataupun Uji Kompetensi yang diselenggarakan LKPP yang dibiayai oleh pemerintah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	100%
2.1	Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100 %	100%
	a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	b. Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung Indikator Sasaran Tingkat Kematangan Organisasi , yaitu

Kegiatan Penataan Organisasi dengan subkegiatan :

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada subkegiatan ini berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang SOTK 5 Perangkat Daerah yang berubah yaitu Bapperida, Perubahan Ketiga Perbup Anjab ABK serta Dokumen Kematangan Organisasi Kabupaten Pekalongan.

b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Output yang dihasilkan pada subkegiatan ini adalah Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, dan dilakukan monev per triwulan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- 1) Regulasi dari MENPAN RB yang berubah – ubah

Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan provinsi maupun kementerian
- 2) Melakukan penyesuaian produk hukum sesuai regulasi/ketentuan

Untuk indikator Kinerja Sasaran Tingkat kematangan organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa pada tahun 2024 telah mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena pencapaian Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dengan 9 (Sembilan) variabel lengkap



Sasaran 2 : Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2022	Realisasi tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA	% Capaian Terhadap Kinerja Pada Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83	83,44	83,6	83,35	99,70	80	104,19
Rata - rata						99,70		104,19

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten. Capaian kinerja dari sasaran ini pada tahun 2024 adalah 99,70% dengan kategori **BAIK** dengan nilai IKM 83,35 .

Untuk Capaian Nilai IKM 83,35 (Baik) ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berada dalam mutu pelayanan baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten ini diperoleh dari rata – rata nilai IKM yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

IKM Kabupaten Pekalongan tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan, sebesar 0,09 dari 83,44 menjadi 83,35.

Hal ini disebabkan ada beberapa Unit Pelayanan Publik yang mengalami penurunan IKM dan memiliki IKM di bawah 80,00, yaitu :

- a) DKPP : 74,28
- b) RSUD Kraton : 77,60
- c) Kec. Petungkriyono : 79,55
- d) Kec. Karanganyar : 77,03
- e) Kec. Wonopringgo : 78,01
- f) Puskesmas Petungkriyono : 79,80
- g) Puskesmas Paninggaran : 79,43
- h) Puskesmas Karanganyar : 79,80
- i) Puskesmas Bojong I : 78,87
- j) Puskesmas Wonopringgo : 79,80
- k) Puskesmas Tirto II : 79,96
- l) Puskesmas Wonokerto : 79,09
- m) Puskesmas Kesesi I : 78,54
- n) Puskesmas Sragi I : 73,38
- o) Puskesmas Wiradesa : 79,05

Untuk Target indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten tahun 2024 ini lebih tinggi dari target awal yang ditentukan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan maupun RENSTRA SETDA yang di tahun 2024 hanya menargetkan indeks IKM sebesar 80. Sehingga jika dibandingkan dengan target RPJMD

maupun RENSTRA capaian IKM Kabupaten Tahun 2024 melebihi target dengan capaian 104,19 % kategori **SANGAT BAIK**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah :

- Rapat koordinasi dengan semua UPP dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
- Melakukan pendampingan kepada beberapa UPP tersebut untuk melakukan peningkatan pelayanan

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Capaian Kinerja Nasional/Provinsi .

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Nasional/Provinsi

No	Uraian	Realisasi 2024	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,35 (Baik)	IKM Provinsi Jawa Tengah = 88 (Baik)	94,72 %

Untuk capaian indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM), secara angka masih berada dibawah capaian provinsi Jawa Tengah namun masih dalam kategori yang sama yaitu BAIK.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi Tahun 2024 dengan sumber anggaran dari APBD sebesar Rp.53.106.430.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.50.430.110.443,00 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp.2.676.320.157,00 Atau terserap sebesar 94,96 % dengan efisiensi sebesar 5,04 %.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.8
Efisien Anggaran sasaran Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Sekretariat Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keuangan			
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,6	83,35	99,70	53.106.430.600	50.430.110.443	94,96	5,04

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Prosentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
1.1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100%	100%
	a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
	b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase permohonan kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kerjasama yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan pada tahun 2024, adalah:

- Kerjasama dalam bentuk Sinergi (dukungan Program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah) : 5 (Lima) Naskah Kesepakatan
- Kerjasama dengan Daerah lain : 3 (Tiga) Naskah perjanjian kerjasama
- Kerjasama dengan Pihak ketiga : 2 (Dua) Naskah Kesepakatan bersama dan 5 (Lima) Naskah Perjanjian Kerjasama.

b. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

- Kerjasama dengan Pemerintah Di Luar Negeri : 1 laporan

c. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Berupa laporan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
		b. Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %
1.2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum	100 %	100 %	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
		dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah			
	a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
	b. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15 Kasus	15 Kasus	100 %
	c. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan mencapai 100 %, dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Hukum dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati Pekalongan dan Keputusan Bupati Pekalongan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan. Pada tahun 2024 ini ada 11 Peraturan Daerah, 83 Peraturan Bupati dan 400 Surat Keputusan Bupati Pekalongan yang dihasilkan.

b. Fasilitas Bantuan Hukum

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah:

- memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Mengkoordinasikan data dari OPD terkait penyusunan Laporan Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

Tabel 3.8

Rekapitulasi Penerima Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Tahun 2024

No	Nama Pemohon Bantuan Hukum	Umur (TH)/Jenis Kelamin (L/P)	Tanggal Pengajuan Permohonan Hukum	Tanggal Penerimaan Bankum	No Perkara/Nomor Putusan	Tanggal Putusan
1	Tasiun	70 / L	29 Februari 2024	29 Februari 2024	34/Pid.sus/2024/P N.Pkl	17 April 2024
2	Sarwo Gangsar	54 / L	21 Februari 2024	21 Februari 2024	23/Pid.sus/2024/P N.Pkl	3 April 2024
3	Faizal Ilmi dkk	18 / L dst	27 Maret 2024	26 Maret 2024	1/Pid.sus-Anak/2024/PN.Pkl	4 April 2024
4	M. Nanza Ferdianzah	16/ L	3 Juli 2024	4 Juli 2024	4/Pid-Sus/2024/PN.Pkl	17 Juli 2024
5	Miftakhul Hadi Suroto	52 / L	10 Juli 2024	10 Juli 2024	147/Pid.sus/2024/PN.Pkl	20 Agustus 2024
6	Gunawan	28 / L	26 Juni 2024	26 Juni 2024	138/Pid.sus/2024/PN.Pkl	15 Agustus 2024
7	Mukti Ali	51 /L	17 Juli 2024	17 Juli 2024	149/Pid.sus/2024/PN.Pkl	28 Agustus 2024
8	Eka Purwanti	36 /P	11 Juli 2024	11 Juli 2024	148/Pid.sus/2024/PN.Pkl	14 Agustus 2024
9	Wahyu Budi Prasetyo	54/L	3 Juli 2024	3 Juli 2024	155/Pid.B/2024/P N.Pkl	5 Juni 2024
10	M. Yahya	39/L	5 Juli 2024	5 Juli 2024	28/Pid.sus/2024/PN.Pkl	18 April 2024
11	Ridho Zulian	24/L	27 Maret 2024	27 Maret 2024	87/Pid.sus/2024/P N.Pkl	4 Juli 2024
12	Adi Purwanto	32/L	13 Agustus 2024	13 Agustus 2024	171/Pid.Sus/2024 /PN.PKL	19 September 2024
13	Deni Ariyanto	25/L	30 Juli 2024	30 Juli 2024	158/Pid.Sus/2024 /PN.PKL	11 September

						2024
14	Atang Masasi	41/L	29 Agustus 2024	29 Agustus 2024	194/Pid.B/2024/P N.PKL	16 Oktober 2024
15	Abdul Saifudin	20/L	5 September 2024	5 September 2024	195/Pid.B/2024/P N.PKL	31 Oktober 2024

c. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah: melaksanakan pengelolaan website JDIH dan pengarsipan Produk Hukum Daerah serta mendokumentasikannya.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Tidak adanya tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Pekalongan;
 - 2) Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Hukum sehingga kegiatan penyuluhan hukum belum bisa berjalan;
 - 3) Kurangnya jumlah Laptop, PC, Printer dan Scanner sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas
 - 4) Belum adanya tenaga IT untuk mengelola website Bagian Hukum
 - 5) Kurangnya tenaga fungsional jenjang Ahli Muda yang bertindak sebagai PPTK Sub Kegiatan karena adanya mutasi 2 tenaga fungsional Ahli Muda sehingga hanya ada satu PPTK yang handle 5 sub kegiatan
- Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :
- 1) Mengajukan penambahan personel di Hukum SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
 - 2) Mengajukan usulan anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum sehingga kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat bisa berjalan
 - 3) Mengusulkan Pengadaan Komputer, printer; dan scanner ke Bagian Umum;
 - 4) Mengajukan permintaan tenaga IT baik dari PNS, PPPK maupun supporting staff;
 - 5) Penambahan tenaga fungsional Ahli Muda melalui Perpindahan Jabatan dari Jabatan Fungsional Umum

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1.		c. Presentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100%	100%	100%
1.3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
	a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.		d.Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%
1.4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan	100 %	100 %	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
		kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi			
	b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Kesejahteraan Masyarakat	Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Bina Mental spiritual mencapai 100 % dan Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi juga mencapai 100 %.

Capaian Program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang capaian kinerjanya mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan subkegiatan:

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual antara lain :

1) Fasilitasi Penyelenggaraan haji (Pengantaran dan penjemputan calon jamaah haji ke Asrama Donohudan – Solo)

Pelepasan Pemberangkatan Jamaah Haji terbagi menjadi 3 kloter yaitu kloter 34, 35 dan Kloter 36. Rombongan Jamaah Calon Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 34 yang berjumlah 323 berangkat dari Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 06.30 WIB, sedangkan rombongan Jamaah Calon

Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 35 dan 36 yang berjumlah 545 orang berangkat dari Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Pekalongan hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 08.00 WIB Kloter 35 dan Kloter 36 jam 11.30 WIB.



Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 34, 35 & 36 pada hari selasa tanggal 2 - 3 Juli 2024. Rombongan Jemaah Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 34 yang berjumlah 323 orang tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali Tanggal 2 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB. Selanjutnya rombongan menuju ke Kabupaten Pekalongan pukul 09.30 WIB, hari Selasa, 02 Juli 2024 Rombongan jama'ah Haji kloter 34 tiba dan diterima Bupati di Pendopo pada pukul 12.50 WIB.

Adapun Rombongan Jemaah Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 35 berjumlah 355 orang baru tiba di Asrama Haji Donohudan Selasa, 2 Juli 2024 pukul 13.45 WIB Selanjutnya rombongan menuju ke Kabupaten Pekalongan pukul 14.30 WIB, dan masuk Pendopo Rumdin Bupati Pukul 20.15 WIB.

Sedangkan Kloter 36 jam baru tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali Rabu, 3 Juli 2024 Pukul 01.50 WIB. Selanjutnya rombongan Jemaah Haji menuju Kabupaten Pekalongan pada pukul 06.00 WIB Pada jam 06.40 WIB rombongan jama'ah Haji kloter 36 tiba dan diterima Bupati di Pendopo.



2) Fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diantaranya :

a) Isro Mi'roj

Peringatan Isra Miroj Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 / 1445 H dengan penceramah Gus Zaman Assekhal serta dimeriahkan oleh Group Sholawat “Gandrung Nabi” dari Kabupaten Grobogan , dan dihadiri ribuan jamaah dari seluruh daerah.



b) Nuzulul Qur'an

Peringatan turunya Al-Quran Kepada Nabi Muhammad SAW (Nuzulul Quran) dilaksanakan pada tanggal 02 April 2024 / 1445 H di Masjid Al-Huda Desa Kalijambe Kec. Sragi dengan penceramah Habib Ahmad Al Habsiy dan dimeriahkan oleh Qori' Qori'ah Tingkat

Kabupaten, Provinsi maupun Nasional . Acaranya berjalan lancar dan dihadiri oleh ribuan Jamaah



c) Perayaan Idul Fitri

Perayaan Kemenangan Umat Islam setelah menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan. Peringatan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tingkat Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di Masjid Al Muhtaram – Kajen pada hari Kamis Tanggal 11 April 2024 dengan Imam Bapak Ali Musyafa Alhafid, S.IP (Pengasuh Ponpes Az-zabur Kajen).



d) Perayaan Idul Adha

Perayaan yang juga disebut Idul Qurban atau Hari Raya Haji, Peringatan ini dilakukan dengan menyembelih hewan Qurban. Peringatan Hari Raya Idul Adha 1445 H tingkat Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan di Masjid Al Muhtaram – Kajen pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024 dengan pematangan hewan Qurban.



e) Tahun Baru Islam 2024 / Gebyar Muharram 1445 H

Peringatan Gebyar Muharram 1445 H dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2024 di Pendopo Bupati Pekalongan dengan acara Khotmil Quran & Doa Bersama Santri TPQ Se-Kabupaten Pekalongan



f) Maulid Nabi Muhammad SAW

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut Peringatan Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 16 September 2024 / 1445 H, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024



3) Fasilitasi Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan

Kegiatan yang dianggarkan untuk Pembinaan Bupati Pekalongan Bidang Keagamaan yang berupa menghadiri Kegiatan Keagamaan di wilayah Kabupaten Pekalongan, undangan dari masyarakat maupun kegiatan yang dilaksanakan di Lingkungan Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2024, Berikut contoh Kegiatan Pembinaan Bupati Bidang Agama:

- a). Hafiah Dzikro Maulid Nabi Muhammad SAW & Haul Syech Abdurrahman, Mbah Citrowongso serta Sesepeuh Desa Gumingsir Langkap – Kedungwuni

Dilaksanakan hari Ahad malam Senin, Tanggal 3 Maret 2024 M / 23 Sya'ban 1445 H akan dihadiri para Habib dan Kyai serta dimeriahkan grup Simtudduror "Gandrung Nabi" dari Grobogan dan Tausiyah "Habib Hamid bin Sholeh Ba'agil dari Semarang.



b). Kabupaten Pekalongan Bersholawat

- Bersholawatan di Kedungwuni

Pengajian yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 / 1445 H bersama Gus H. Chafidzul Hakiem Noer serta dimeriahkan oleh Majelis Ta'lim Shalawatan "Syubanal Muslimin" dari Probolinggo Jawa Timur, Kegiatan ini sekaligus untuk menghimbau Masyarakat agar menjaga Persaudaraan Jelang Pemilu 2024

c). Tarawih Keliling

Kegiatan Pelaksanaan Tarawih Keliling Bupati Pekalongan di 5 Masjid dan Wakil Bupati Pekalongan ada 3 Masjid yang sudah terjadwal selama puasa dan bertempat di Masjid – masjid Desa yang ada di Kawasan Kabupaten Pekalongan

- Masjid Al Fattah Dk. Nambangan Desa Nyamuk Kajen
- Masjid Al Mubarak Dk. Blando Wringinagung Doru
- Masjid Baitul Muttaqin Desa Kemplong Wiradesa
- Masjid Baiturrohman Desa Pododadi Karanganyar
- Masjid Fatchul Jannah Desa Watugajah Kesesi
- Masjid Al Falah Desa Wonokerto
- Masjid Darussalam Desa Pangkah Karangdadap
- Masjid Nurul Hasan Desa Pacar Tirto

d). Doa Bersama Antar Umat Beragama dalam Rangka Hari Jadi ke-402 Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan 24 Agustus 2024 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan.



e). Kegiatan silaturrohmi / Pembinaan Bupati Bidang Keagamaan Bersama Tokoh Agama / Mubaligh Se-Kabupaten pekalongan Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Setda Kabupaten Pekalongan dengan mengundang Organisasi Islam dan tokoh agama dari PCNU, GP Ansor, Rifaiyah, Muhammadiyah Muslimat, Fatayat, Umri, LDII dan Organisasi Islam lainnya se- Kabupaten Pekalongan.

4) Fasilitasi Peringatan Hari Santri (Ziarah Makam Ulama)

Ziarah Hari Santri dimaksudkan untuk mengenang dan meneladani perjuangan ulama dan santri dalam membela serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ziarah Hari Santri juga bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter dikalangan santri dan masyarakat luas.

Dilaksanakan Pada Hari Jum'at – Sabtu 9 November 2024 Peserta Ziarah terdiri dari tokoh agama/tokoh masyarakat se-Kabupaten Pekalongan sejumlah ± 500 orang.

Ziarah Hari Santri untuk Tahun 2024 dilaksanakan dengan rute tujuan :

a) Makam KH. Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang Jawa Timur



b) Makam KH. Hasbullah tambak Beras Jombang Jawa Timur



b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial antara lain :

1) Pemberian Bantuan Sosial Kambing Qurban kepada lembaga Non Pemerintahan dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1445 H

Pada tahun 2024 tersedia anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada lembaga non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) diserahkan dalam bentuk Kambing Qurban yang diserahkan kepada lembaga yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan.



2) Pemberian Insentif Imam dan Marbot Masjid di wilayah Kabupaten Pekalongan

Pemberian Insentif Kepada 870 Iman Masjid dan 870 Marbot Masjid yang sesuai usulan data dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan diserahkan kepada 870 Marbot Masjid dan 870 Imam Masjid pada saat bulan Ramadhan atau bulan April 2024 dengan nominal uang sebesar Rp.940.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

3) Pemberian insentif penjaga keamanan makam di wilayah Kabupaten Pekalongan

Insentif penjaga keamanan makam diberikan kepada Penjaga Makam di 285 Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan anggaran Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi Rp.84.900.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) atau 99% dengan masing-masing penjaga makam menerima insentif sebesar Rp.300.000,- selisih 2 desa yaitu Kelurahan Wiradesa dan Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa dikarenakan tidak mengusulkan karena di wilayah tersebut tidak terdapat Makam di lokasi kelurahan/desa tersebut.

4) Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar

- ❖ Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan , berjumlah 4 lembaga dengan pencairan 2 tahap, tahap I berjumlah 2 lembaga (Baznas dan KPAIDS) dan Tahap II berjumlah 2 lembaga (PCNU dan PD Muhammadiyah).

- ❖ Belanja hibah yang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), berjumlah 117 lembaga dengan pencairan 2 tahap, tahap I berjumlah 62 lembaga dan Tahap II berjumlah 55 lembaga.
- ❖ Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang bersifat sosial kemasyarakatan Terdiri dari 6 lembaga yaitu DPD LDII, MT Al Khoir Wal Barokah, MUI, PD Rifaiyah, DPC Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kab. Pekalongan
- ❖ Pemberian bantuan yang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) berjumlah 21 lembaga
 - (i) Lembaga Sosial Ummul Yatama
 - (ii) Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdlatul Ulama Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar
 - (iii) Organisasi Sosial Anak Yatim Yarohim
 - (iv) Panti Asuhan Anak Yatim La Tahzan Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa
 - (v) Panti Asuhan Arrahman Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa
 - (vi) Panti Asuhan Darul Aitam Al Maktab Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran
 - (vii) Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Sedayu Kecamatan Wonopringgo
 - (viii) Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah Wonopringgo
 - (ix) Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni
 - (x) Panti Asuhan Raudhotus Sibyan Desa Proto Kecamatan Kedungwuni
 - (xi) Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang Muhammadiyah Kedungwuni
 - (xii) Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Muhammadiyah Kajen

- (xiii) Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni
- (xiv) Yayasan Darul Khadhonah Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa
- (xv) Yayasan Malakhatul Ummah Kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa
- (xvi) Yayasan Non Panti Yatama Al Amin Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
- (xvii) Yayasan Sayap Sehat Karanganyar
- (xviii) Yayasan Sosial Tabarat Kelurahan Kepatih Kecamatan Wiradesa
- (xix) Yayasan Yatim Non Panti Mu'awanatul Aitam Simbang Kulon Kecamatan Buaran
- (xx) Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul Yatama Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto
- (xxi) Yayasan Yatim Piatu Non Panti Bani Aziz Fatimah Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat antara lain:

- 1) Memfasilitasi Kegiatan MTQ, STQ, MHQ Kabupaten Pekalongan
Peserta terdiri dari MTQ Pelajar di ikuti oleh perwakilan pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Putra/Putri. Di tahun 2024 tidak dilaksanakan Seleksi tingkat Kabupaten Karena JuaraTahun 2023 dilombakan tingkat Provinsi dan Nasional.
- 2) Mudik Asyik Mudik Gratis Kabupaten Pekalongan
Pelaksanaan Kegiatan Mudik Lebaran Gratis Warga Jawa Tengah di Jabodetabek pada tanggal 5-6 April 2024 di Museum Puma Bhakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur



3) Fasilitasi Semarak Hari Santri Tingkat Kabupaten

Semarak Hari Santri Merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam rangka penghormatan dan penghargaan bagi perjuangan para ulama, dan tokoh keagamaan dalam rangka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Apel Besar Hari Santri Nasional.

Upacara Hari Santri Nasional dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 peserta Upacara terdiri dari unsur Forkompimda, PCNU, PD Rifaiyah, PD Muhammadiyah, PD LDII, ITS NU, Kepala OPD, Camat, ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, TNI, POLRI, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan Santri Pondok Pesantren, Mahasiswa, Siswa/Siswi Sekolah

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Berkurangnya jumlah personil pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Pekalongan karena promosi jabatan

- 2) PPTK pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda hanya ada 1 (satu) Subkoordinator, maka penunjukan PPTK untuk kegiatan mengalami kendala
- 3) Kurangnya koordinasi dengan OPD lain terkait perencanaan kegiatan;
- 4) Belum ada teknologi aplikasi dalam penanganan usulan hibah/bansos;
- 5) Regulasi terkait tata laksana administrasi hibah/bansos belum terupdate dengan aturan yang ada
- 6) Adanya anggaran untuk hibah pikir, tetapi tidak didukung dengan administrasi dari pengusul.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Mengajukan penambahan Subkoordinasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Pekalongan;
- 3) Mengkoordinasikan dengan OPD teknis terkait kegiatan yang dapat disatukan sehingga ada efisiensi anggaran;
- 4) Membuat usulan terkait Pengadaan Aplikasi E-Hibah/Bansos
- 5) Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai Regulasi Hibah/Bansos agar segera diperbaharui
- 6) Dukungan dari pikir pengusul agar mengirimkan proposal permohonan satu tahun sebelumnya.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a.Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan	100 %	100 %	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
		Pemerintah			
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 Orang/Bulan	153 Orang/Bulan	100%
	b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	100 %	100%
	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	39 Orang	75,08%
	c. Sosialisasi	Jumlah Orang	90 Orang	106	117,78%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Peraturan Perundang- Undangan	yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Orang	
	d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 Orang	100 Orang	100%
2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	d. Penyediaan	Jumlah Paket	4 Paket	4 Paket	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100 %
2.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	c. Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12	12	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	laporan	
	d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100 %
2.5	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100 %
	b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100 %
2.6.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	dan Wakil Kepala Daerah	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ Bulan	8 Orang/ Bulan	100 %
2.7	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	100%	100 %
	a. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah mencapai 100 %.

Kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator prosentase ketersediaan layanan adminatrasi kepegawaian,adminstrasi umum dan jasa

penunjang urusan pemerintah merupakan kegiatan rutin yang diampu oleh Bagian Umum, Bagian Hukum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian capaian kinerja :

- 1) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang masih belum mencukupi kebutuhan yaitu lensa kamera untuk pengambilan gambar jarak jauh (lensa tele), perangkat keras untuk menyimpan dan mengelola semua konten digital, dokumen, foto dan video kegiatan pimpinan.
- 2) Sumber daya manusia yang perlu penguasaan dalam bidang Kehumasan

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Perlu adanya Pelatihan kehumasan dan studi tiru ke daerah lain
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
2		a. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %
2.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	100 %
	b. Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan	41 Unit	41 Unit	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Disediakan			
2.9	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	70 Unit	70 Unit	100 %
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	100 %
	c. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	78 Unit	78 Unit	100 %
	d. Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan	242 Unit	242 Unit	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
	Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara			
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah mencapai 100 %.

Kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan rutin yang diampu oleh Bagian Umum.

Untuk Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Bagian Hukum pada tahun 2024 telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Hak Asasi Manusia dalam kategori Kabupaten/Kota Peduli HAM.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memperoleh dana bersumber dari APBD yang berupa anggaran belanja pengadaan dan anggaran belanja non pengadaan.

Belanja Non Pengadaan atau yang dulu disebut Belanja Tidak Langsung (Anggaran gaji/tunjangan ASN Dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Belanja Hibah Uang dan Bantuan Sosial uang) sebesar Rp. 27.430.055.000,00 terealisasi sebesar Rp. 26.100.953.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.329.101.294,00 Belanja pengadaan atau belanja langsung diluar belanja pegawai/Hibah dan Bansos uang sebesar Rp. 28.870.982.000,00 terealisasi sejumlah Rp. 27.359.852.839,00 sisa anggaran Rp. 1.511.129.161,00 Dengan keseluruhan belanja pengadaan maupun belanja non pengadaan sebesar Rp.

56.301.037.000,00 realisasi Rp.53.460.805.839,00 sisa anggaran Rp. 2.840.231.161,00

Tabel 3.9
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran dan Efisiennya

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	925.000.000,00	878.196.471,00	94,94	5,06%
	Kegiatan Administrasi Ta Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	100 %	100 %	925.000.000,00	878.196.471,00	94,94	5,06%
		b. Prosentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	144.000.000,00	99.835.749,00	69,33	30,67%
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	144.000.000,00	99.835.749,00	69,33	30,67%
		c. Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %	382.800.000,00	365.316.319,00	95,43	4,57 %
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	100 %	100 %	382.800.000,00	365.316.319,00	95,43	4,57 %
		d. Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	4.872.400,00	4.606.592,332,00	94,54	5,46 %

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
		e. Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	11.358.600.000,00	10.598.753.092,00	93,31	6,69 %
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	16.231.000.000,00	15.205.345.424,00	93,68	6,32 %
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %	100 %	100 %	951.406.400,00	891.110.538,00	93,66	6,34 %
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	100 %	100 %	620.000.000,00	569.616.247,00	91,87	8,13 %
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %	100 %	100 %	331.406.400,00	321.494.291,00	97,01	2,99 %
		b. Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	100 %	100 %	323.000.000,00	304.638.622,00	94,32	5,68 %
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100 %	100 %	100 %	323.000.000,00	304.638.622,00	94,32	5,68 %
		c. Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Angka	9 Angka	100	605.000.000,00	595.663.023,00	98,46	1,54%
	Kegiatan	Persentase	100 %	100 %	100 %	605.000.000,00	595.663.023,00	98,46	1,54%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				00	3,00		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 %	100 %	100 %	390.200.000,00	361.086.742,00	92,54	7,46 %
	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100 %	100 %	351.000.000,00	323.245.842,00	92,09	7,91 %
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	39.200.000,00	37.840.900,00	96,53	3,47 %
		b. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	32.354.130.600,00	30.919.360.421,00	95,57	4,63 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	18.520.055.000,00	17.884.318.706,00	96,57	3,43 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	100 %	100 %	289.825.600,00	243.865.344,00	84,14	15,86 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	3.292.000.000,00	3.243.443.995,00	98,53	1,47 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	3.877.250.000,00	3.688.841.706,00	95,14	4,86 %

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Daerah								
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	1.824.440.000,00	1.409.829.520,00	77,27	22,73 %
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	2.220.000.000,00	2.123.250.078,00	95,64	4,36 %
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	2.330.560.000,00	2.325.811.072,00	99,80	0,2 %
		c. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	3.994.500.000,00	3.840.252.530,00	96,14	3,86 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	747.500.000,00	740.711.160,00	99,09	0,91 %
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	3.247.000.000,00	3.099.541.370,00	95,46	4,54 %

Terdapatnya sisa anggaran karena ada efisiensi dan pengeluaran belanja sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan jumlah dana belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terinci sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dari anggaran Rp. 1.069.000.000,00 terserap sejumlah Rp. 978.032.220,00 dan sisa anggaran Rp. 90.967.780,00
- b. Dilaksanakan oleh Bagian Hukum dari anggaran Rp. 441.800.000,00 terserap sejumlah Rp. 422.722.459,00 dan sisa anggaran Rp. 19.077.541,00

- c. Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dari anggaran Rp. 16.231.000.000,00 terserap sejumlah Rp. 15.205.345.424,00 dan sisa anggaran Rp. 1.025.654.576,00
- d. Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dari anggaran Rp. 951.406.400,00 terserap sejumlah Rp. 891.110.538,00 dan sisa anggaran Rp. 18.361.378,00
- e. Dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dari anggaran Rp. 362.200.000 terserap sejumlah Rp. 342.479.522 dan sisa anggaran Rp. 19.720.478,00
- f. Dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dari anggaran Rp. 605.000.000,00 terserap sejumlah Rp. 595.663.023,00 dan sisa anggaran Rp. 9.336.977,00
- g. Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dari anggaran Rp. 351.000.000,00 dan terserap sejumlah Rp. 323.245.842,00 dan sisa anggaran Rp. 27.754.158,00
- h. Dilaksanakan oleh Bagian Umum dari anggaran Rp. 33.029.630.600,00 dan terserap sejumlah Rp. 31.693.201.445,00 dan sisa anggaran Rp. 1.336.429.155,00
- i. Dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dari anggaran Rp. 3.260.000.000,00 dan terserap sejumlah Rp. 3.009.005.366,00 dan sisa anggaran Rp. 250.994.634,00

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan administrasi keuangan secara tertib sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersirat dalam Bab III, maka dapat diketahui sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 2 (dua)** sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, indikator kinerja sasaran sudah mencapai kategori yang diharapkan dan secara nilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran tertinggi adalah Tingkat Kematangan Organisasi dengan capaian sebesar 105,63 %

Nilai rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar 101,60 %, capaian kinerja ini masuk dalam kategori **Sangat Baik**

B. Prestasi yang diraih di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Prestasi/ Penghargaan yang diraih adalah :

1. Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)
2. Kabupaten dengan kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dengan 9 Variabel lengkap

C. Hal – hal yang ingin dicapai ditahun mendatang

- 1) Meningkatkan peran sekretariat daerah selaku fungsi koordinator dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas sehingga bisa mencapai target Nilai AKIP yang direncanakan
- 3) Meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi sesuai dengan regulasi yang ada
- 4) Meningkatkan pelayanan publik sehingga indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diinginkan dapat tercapai.

- 5) Melaksanakan pengelolaan Kelembagaan sesuai regulasi terbaru sehingga indeks kematangan organisasi yang ditargetkan bisa tercapai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang dapat kami sampaikan, sebagai acuan kerja selanjutnya.

Kajen, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

MATRIK CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2024	TARGET AKHIR PERENCANAAN	% CAPAIAN TERHADAP KINERJA PADA AKHIR PERENCANAAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			OPD PENANGGUNG JAWAB
										URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,90)	B (65,69)	101,22	BB (75)	87,59	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah	925.000.000	878.196.471	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
										Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000	82.484.500	
										Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.000.000	97.127.500	
										Subkegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	725.000.000	698.584.471	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah	620.000.000	569.616.247	BAGIAN PEREKONOMIAN
										Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	305.000.000	275.472.867	
										Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	315.000.000	294.143.380	
								Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah	331.406.400	321.494.291	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
									Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	257.406.400	249.809.165		
									Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	74.000.000	71.685.126		
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah	323.000.000	304.638.622	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
	Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	135.000.000	123.956.006										

									Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	188.000.000	180.682.616	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah	225.000.000	206.314.782	BAGIAN ORGANISASI
									Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000	47.143.363	
									Subkegiatan Fasilitas pelayanan publik dan tata laksana	125.000.000	113.218.045	
									Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000	45.953.374	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah	39.200.000	37.840.900	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
									Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	26.903.850	
									Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.600.000	5.337.150	
									Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000	5.599.900	
	Tingkat Kematangan Organisasi	S (36,6)	T (38,66)	105,63	T (37)	104,49	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah	605.000.000	595.663.023	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
									Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	375.000.000	374.870.834	
									Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	175.000.000	171.897.089	
									Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55.000.000	48.895.100	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah	126.000.000	116.931.060	BAGIAN ORGANISASI
									Subkegiatan Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	46.000.000	39.956.500	

										Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	80.000.000	76.974.560		
2	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,6	83,35	99,70	80	104,19	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah	144.000.000	99.835.749	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
										Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	100.000.000	61.462.023		
										Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	14.000.000	13.807.726		
										Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.000.000	24.566.000		
									Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah	382.800.000	365.316.319	BAGIAN HUKUM	
									Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	134.368.000	124.270.078			
									Subkegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	185.432.000	182.062.687			
									Subkegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi	63.000.000	58.983.554			
									Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah	16.231.000.000	15.205.345.424	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
									Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.872.400.000	4.606.592.332			
								Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.884.500.000	10.175.431.500				
								Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	474.100.000	423.321.592				
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah	18.520.055.000	17.884.318.706	BAGIAN UMUM	
									Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.125.055.000	17.511.967.206			
									Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	395.000.000	372.351.500			
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah	289.825.600	243.865.344	BAGIAN UMUM, BAGIAN HUKUM		

									Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	71.825.600	67.075.724	BAGIAN UMUM
									Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.000.000	119.383.480	
									Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	43.424.640	BAGIAN HUKUM
									Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	13.981.500	
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah	3.292.000.000	3.243.443.995	BAGIAN UMUM
									Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	84.786.450	
									Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.000.000	307.183.650	
									Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	340.000.000	333.608.000	
									Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.000.000	157.965.500	
									Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.900.000.000	1.889.642.500	
									Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	431.266.395	
									Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.000.000	38.991.500	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah	3.877.250.000	3.688.841.706	BAGIAN UMUM
									Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.550.000.000	1.409.336.454	
									Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.250.000	437.141.244	

										Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.000.000	970.699.500
										Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	713.000.000	678.861.820
										Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	175.000.000	171.056.000
										Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	308.000.000	291.718.550
										Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	988.000.000	967.205.500
Jumlah											56.301.037.000	53.460.805.839

Kajen, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008



RINCIAN REALISASI KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1)	Bagian Tata Pemerintahan	1.069.000.000	978.032.220	91,49	90.967.780	8,51
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000	82.484.500	82,48	17.515.500	17,52
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100.000.000	97.127.500	97,13	2.872.500	2,87
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	725.000.000	698.584.471	96,36	26.415.529	3,64
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100.000.000	61.462.023	61,46	38.537.977	38,54
5	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	14.000.000	13.807.726	98,63	192.274	1,37
6	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30.000.000	24.566.000	81,89	5.434.000	18,11
2)	Bagian Hukum	441.800.000	422.722.459	95,68	19.077.541	4,32
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	134.368.000	124.270.078	92,48	10.097.922	7,52
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	185.432.000	182.062.687	98,18	3.369.313	1,82
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	63.000.000	58.983.554	93,62	4.016.446	6,38
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	43.424.640	96,50	1.575.360	3,50
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	13.981.500	99,87	18.500	0,13
3)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	16.231.000.000	15.205.345.424	93,68	1.025.654.576	6,32
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.872.400.000	4.606.592.332	94,54	265.807.668	5,46
2	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.884.500.000	10.175.431.500	93,49	709.068.500	6,51
3	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	474.100.000	423.321.592	89,29	50.778.408	10,71
4)	Bagian Perekonomian	951.406.400	891.110.538	93,66	60.295.862	6,34
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	305.000.000	275.472.867	90,32	29.527.133	9,68
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	315.000.000	294.143.380	93,38	20.856.620	6,62
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	257.406.400	249.809.165	97,05	7.597.235	2,95
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	74.000.000	71.685.126	96,87	2.314.874	3,13
5)	Bagian Administrasi Pembangunan	362.200.000	342.479.522	94,56	19.720.478,00	5,44
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	135.000.000	123.956.006	91,82	11.043.994	8,18
2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	188.000.000	180.682.616	96,11	7.317.384	3,89
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	26.903.850	96,09	1.096.150	3,91
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.600.000	5.337.150	95,31	262.850	4,69
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.600.000	5.599.900	100,00	100	0,00
6)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	605.000.000	595.663.023,00	98,46	9.336.977	1,54
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	375.000.000	374.870.834	99,97	129.166	0,03
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	175.000.000	171.897.089	98,23	3.102.911	1,77
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55.000.000	48.895.100	88,90	6.104.900	11,10
7)	Bagian Oganisasi	351.000.000	323.245.842	92,09	27.754.158	7,91
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	50.000.000	47.143.363	94,29	2.856.637	5,71
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	125.000.000	113.218.045	90,57	11.781.955	9,43
3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50.000.000	45.953.374	91,91	4.046.626	8,09
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46.000.000	39.956.500	86,86	6.043.500	13,14
5	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	80.000.000	76.974.560	96,22	3.025.440	3,78

8)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.260.000.000	3.009.005.366	92,30	250.994.634	7,70
1	Fasilitasi Keprotokolan	233.000.000	233.000.000	100,00	-	0,00
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	595.092.300	594.637.412	99,92	454.888	0,08
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.502.467.700	1.498.173.660	99,71	4.294.040	0,29
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	929.440.000	683.194.294	73,51	246.245.706	26,49
9)	Bagian Umum	33.029.630.600	31.693.201.445	95,95	1.336.429.155	4,05
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.125.055.000	17.511.967.206	96,62	613.087.794	3,38
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	395.000.000	372.351.500	94,27	22.648.500	5,73
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	71.825.600	67.075.724	93,39	4.749.876	6,61
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.000.000	119.383.480	75,08	39.616.520	24,92
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	84.786.450	99,75	213.550	0,25
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.000.000	307.183.650	99,09	2.816.350	0,91
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	340.000.000	333.608.000	98,12	6.392.000	1,88
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.000.000	157.965.500	99,98	34.500	0,02
9	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.900.000.000	1.889.642.500	99,45	10.357.500	0,55
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	431.266.395	93,75	28.733.605	6,25
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.000.000	38.991.500	99,98	8.500	0,02
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.550.000.000	1.409.336.454	90,92	140.663.546	9,08
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.250.000	437.141.244	94,57	25.108.756	5,43
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.840.000.000	1.823.109.008	99,08	16.890.992	0,92
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	19.255.000	77,02	5.745.000	22,98
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	726.635.226	81,19	168.364.774	18,81
17	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.275.000.000	1.251.968.054	98,19	23.031.946	1,81
18	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	945.000.000	871.282.024	92,20	73.717.976	7,80
19	Pengadaan Mebel	220.000.000	218.295.500	99,23	1.704.500	0,77
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	527.500.000	522.415.660	99,04	5.084.340	0,96
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.000.000	970.699.500	91,32	92.300.500	8,68
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	713.000.000	678.861.820	95,21	34.138.180	4,79
23	Pemeliharaan Mebel	175.000.000	171.056.000	97,75	3.944.000	2,25
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	308.000.000	291.718.550	94,71	16.281.450	5,29
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	988.000.000	987.205.500	99,92	794.500	0,08
TOTAL SETDA		56.301.037.000	53.460.805.839	94,96	2.840.231.161	5,04



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kodepos 51161
Telepon (0285) 381000 - 381001 Psw. 115 Faksimile (0285) 381006 Laman
<http://www.pekalongankab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 000.8.6.3/00001 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024;
 - b. mengoordinasikan dan menghimpun capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
 - c. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2024;
 - d. melaksanakan updating data capaian kinerja tingkat Pemerintah Daerah ke dalam aplikasi e-SAKIP Tahun 2024;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
- f. menyusun dokumen perencanaan lainnya guna peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
PEKALONGAN,



M. YULIAN AKBAR

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan
Nomor : 000.8.6.3/00001
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si. NIP. 19750710 199903 1 008	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Dra. SITI MASRUOH, M.Si. NIP. 19680906 199302 2 003	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Wakil Ketua
3	ANIS ROSIDI, S.Sos, M.Si. NIP. 19691114 199603 1 005	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua
4	EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng. NIP. 19711225 199803 1 009	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Sekretaris
5	DIAH YUNIARTI, S.T. NIP. 19810605 200604 2 016	Analisis Kebijakan Ahli Muda yang membidangi Penyusunan Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
6	GALUH AJENG HANJAYA, S.E. NIP. 19940928 202012 2 035	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
7	TITIS PURWANING, S.AP NIP. 19810424 201001 2 027	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Setda	Anggota
8	WAHYU ARI YUWONO, S.E. NIP. 19880508 201502 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
9	DAYANTI BUDHI ASTUTI, S.Kom. NIP. 19930427 201502 2 001	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik Bagian Perekonomian Setda	Anggota
10	MUHAMMAD YUSUF, S.M. NIP. 19800408 200502 1 006	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Umum Setda	Anggota
11	INES FIERA WIJAYANTI, S.Sos. NIP. 19950211 202012 2 017	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
12	TANTI HARINI, S.H. NIP. 19791024 201001 2 010	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
13	RENI NOFIANA DEWI, S.Kom. NIP. 19891113 202012 2 015	Ahli Pertama Pranata Komputer Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
14	ANOM SANYOTO AJI, S.E. NIP. 19860906 201001 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

M. YULIAN AKBAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : WIDI HARTANTO, S.T., M.T.

Jabatan : Pjs. Bupati Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pjs. BUPATI PEKALONGAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



WIDI HARTANTO, S.T., M.T.



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Tingkat Kematangan Organisasi (Indeks)	S (36,60)
		2. Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	B (64,90)
2.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten (Nilai)	83,60

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 17.682.800.000	APBD
Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.879.406.400	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 36.738.830.600	APBD
Total	Rp. 56.301.037.000	APBD

Kajen, 11 November 2024
 PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

WIDI HARTANTO, S.T., M.T.



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750710 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATIROH, SP, MM.

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

FATIROH, SP, MM.

Pembina

NIP. 19680718 199403 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 Plt. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO. 1	PROGRAM DAN KEGIATAN 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase Bina Mental Spritual yang Difasilitasi	100 %
		2. Persentase Pelaksaaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100%
	1.1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.1. Presentase Kegaitan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang di Fasilitasi	100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 16.231.000.000,-	APBD
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 16.231.000.000,-	APBD

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

FATIROH, SP, MM.
 Pembina
 NIP. 19680718 199403 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTI HARYATI, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

TUTI HARYATI, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19780308 199612 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.1. Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
	1.2. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.2. Prosentase kegiatan keprotokolan yang Terasilitasi	100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3. 260. 000.000,-	APBD
1.1.	Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional; Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 929. 440.000,-	APBD
1.2.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 2. 330. 560.000,-	APBD

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,


Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



TUTI HARYATI, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19780308 199612 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KISTORO, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

KISTORO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.1. Administrasi Tata Pemerintahan 1.2. Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan 1.1. Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan b. Persentase permohonan kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi 1.2. Persentase naskah kerjasama daerah yang terfasilitasi	100 % 100% 100% 100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 1.069.000.000,-	APBD
1.1.	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 925.000.000,-	APBD
1.2.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 144.000.000,-	APBD

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


KISTORO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19750503 201001 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kajen, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008



**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**


SUHERMAN, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

NO. PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.029.630.600	APBD
1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.520.055.000	APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	230.825.600	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.292.000.000	APBD
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.877.250.000	APBD
1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.247.000.000	APBD
1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	747.500.000	APBD
1.7 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.220.000.000	APBD
1.8 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	895.000.000	APBD

Kajen, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI HANIKATUN, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008


SITI HANIKATUN, S.STP., M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19901114 201206 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %
	1.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan money	100 %
	1.2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan money	100 %

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 698.200.000	APBD
	Rp 253.206.400	DBHCHT
1.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 620.000.000	APBD
1.2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 78.200.000	APBD
	Rp 253.206.400	DBHCHT
Jumlah	Rp 951.406.400	

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

SITI HANIKATUN, S.STP., M.Si.

Pemimpin Muda

Penata Tk. I

NIP. 19750710 199903 1 008

NIP. 19901114 201206 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680517 198903 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100%
	a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pembentukan Produk Hukum dan Publikasinya sebagai bentuk Kebijakan Daerah	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 59.000.000	APBD
a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 59.000.000	APBD
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 382.800.000	APBD
a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 382.800.000	APBD
Total	Rp 441.800.000	APBD

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H..
Pembina Tk. I
NIP. 19680517 198903 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711225 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Persentase Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang tersusun 1.1. Presentase Laporan Realisasi Fisik seluruh OPD	100 % 100%
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2.1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% 100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 323.000.000,-	APBD
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 323.000.000,-	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 39.200.000,-	APBD
2.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 39.200.000,-	APBD
TOTAL		Rp. 362.200.000,-	APBD

Kajen, **8 Januari** 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



(Signature)
EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
 Pembina Tingkat I

M. JULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda

NIP. 19711225 199803 1 009

NIP. 19750710 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENURI, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 8 Januari 2024

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

ZAENURI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19721027 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Angka
	1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.1. Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%

- NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- ANGGARAN KETERANGAN
- Rp 605.000.000 APBD
- Rp 605.000.000 APBD

Kajen, **8 Januari** 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750710 199903 1 008

ZAENURI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19721027 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL CHOLIK, SE.MM
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 5 Maret 2024



M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si
NIP. 19730710 199903 1 008

PIHAK PERTAMA

ABDUL CHOLIK, SE.MM
NIP. 19691010 199703 1 007



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DEWI SEPTRIANA KUMALASARI, S.M.
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan,
Staf Ahli dan Kepegawaian
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN TU PIMPINAN,
STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

DEWI SEPTRIANA KUMALASARI, S.M.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19790920 201101 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok.
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok.
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dok.
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	395.000.000	APBD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	71.825.600	APBD
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.000.000	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.000.000	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	APBD
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.000.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.840.000.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.550.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		4.697.825.600	APBD

Kajen, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN

SUHERMAN S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN,
STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN

DEWI SEPTRIANA KUMALASARI, S.M.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19790920 201101 2 004



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAIMUNAH, S.H.
Jabatan : Kepala Subbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUHERMAN, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBAG. RUMAH TANGGA DAN
PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

MAIMUNAH, S.H.
Penata
NIP. 19730517 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN
BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	78 Unit
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	242 Unit
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit
10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 unit
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.900.000.000	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.000.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	340.000.000	APBD
5	Pemeliharaan Mebel	175.000.000	APBD
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	308.000.000	APBD
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	988.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	713.000.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.000.000	APBD
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.250.000	APBD
11	Pengadaan Mebel	220.000.000	APBD
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	527.500.000	APBD
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.275.000.000	APBD
14	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	945.000.000	APBD
Jumlah Anggaran		9.311.750.000	APBD

Kajen, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBAG. RUMAH TANGGA
DAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

MAIMUNAH, S.H.
Penata
NIP. 19730517 199603 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NENI NURHAWATI, S.E.
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

**PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

NENI NURHAWATI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19841210 201001 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melakukan inventarisasi usulan anggaran belanja Operasi dan Belanja Modal dari Bagian-bagian di Setda.	Jumlah dokumen usulan anggaran belanja dari Bagian yang diinventarisasi.	60 dokumen
2	Merancang anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda	Jumlah Dokumen rancangan anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda	2 Dokumen
3	Memverifikasi dokumen Permintaan pembayaran belanja Operasi dan Modal dari bagian - bagian	Jumlah dokumen belanja Operasi dan Modal yang dapat diverifikasi	800 dokumen
4	Memproses permintaan pembayaran Operasi dan Modal dari bagian - bagian	Jumlah dokumen pembayaran belanja Operasi dan Modal dari bagian - bagian	800 dokumen
5	Menyusun laporan semester dan prognosis	Jumlah laporan semester dan prognosis yang disusun	1 Laporan
6	Menyusun laporan keuangan Setda	Jumlah laporan keuangan setda yang disusun	3 Laporan
7	Melaksanakan penatausahaan keuangan Setda	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang dibuat	12 dokumen
8	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Setda	Jumlah personil yang mengikuti pembinaan dan dan Fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Setda	10 Personil
9	Melaksanakan sistem pengendalian intern	Jumlah bulan pelaksanaan sistem pengendalian intern	12 bulan

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan setda	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan setda	600 dokumen
11	Menyusun Rencana Kerja Bagian Umum	Jumlah dokumen Rencana kerja yang disusun	2 Dokumen
12	Menyusun Rencana Aksi Bagian Umum	Jumlah dokumen rencana aksi yang disusun	1 dokumen
13	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Bagian Umum	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1 dokumen
14	Membuat Laporan kinerja Bagian Umum	Jumlah Laporan kinerja Bagian Umum yang dibuat	1 Laporan
15	Menyusun Laporan evaluasi rencana kerja Bagian Umum	Jumlah dokumen Laporan evaluasi rencana kerja Bagian Umum	4 dokumen
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	153 Orang/Bulan
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.125.055.000	APBD
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	APBD
Jumlah		19.020.055.000	APBD

Kajen, 11 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN

SUHERMAN S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680910 198903 1 011

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAG. KEUANGAN
BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN

NENI NURHAWATI, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19841210 201001 2 029



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI MURWATI, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : TUTI HARYATI, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

TUTI HARYATI, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19780308 199612 2 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

TRI MURWATI, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19740710 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	4 Laporan
2	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/Bulan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 233.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 929.440.000,-	APBD
	Total	Rp. 1.162.440.000,-	APBD

Kajen, 11 November 2024

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



TUTI HARYATI, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19780308 199612 2 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



TRI MURWATI, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19740710 199403 2 001